



KR-Antara/Juraidi

**Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Prof Nurhayati mewisuda 1.908 lulusan perguruan tinggi itu, Selasa (14/5/2024). Pada wisuda ke-82 ini, pihaknya memilih tema wisuda ‘UIN Sumatera Utara untuk bangsa, Mengabdikan Tanpa Henti Menyemai Moderasi untuk Kejayaan Negeri’. Rector berharap para alumni mempunyai kewajiban menjaga nama baik almamater. Selain itu, juga memiliki kewajiban membantu UINSU, khususnya dalam pencapaian visi dan misinya.**

## STUDY TOUR HANYA OPSIONAL Disdikpora DIY: Tak Boleh Ada Paksaan

**YOGYA (KR)** - Kasus rombongan study tour SMK Lingga Kencana Depok yang menyebabkan 11 korban jiwa serta belasan lainnya mengalami luka berat di Subang Jawa Barat, menyisakan duka mendalam dan keprihatinan. Kasus kecelakaan tersebut tidak hanya menjadi perhatian tapi perlu menjadi evaluasi bersama dari semua pihak.

Karena keselamatan dan keamanan para pelajar harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pendidikan, termasuk study tour. "Sebetulnya study tour merupakan kegiatan penunjang pembelajaran yang bersifat opsional. Sekolah tak boleh memaksa siswa

mengikuti kegiatan tersebut," kata Kepala Disdikpora DIY, Dr Didik Wardaya MPd, Senin (13/5).

Kebijakan itu, ujarnya, diambil untuk mengedepankan hak dan kenyamanan siswa dalam mengikuti kegiatan di luar jam pelajaran. Didik Wardaya, mengatakan, orang tua memiliki hak untuk menilai manfaat dan menyesuaikannya dengan kondisi keuangan keluarga.

Mengingat study tour sifatnya hanya opsional, jadi tidak boleh ada unsur paksaan. Seandainya kegiatan study tour itu dilaksanakan harus tetap mempertimbangkan keamanan, kemampuan masing-masing peserta didik dan tidak wajib seluruh

peserta didik ikut.

"Kalau study tour murni, pasti ada tempat yang dikunjungi dan konteksnya memperkaya pengalaman atau memperdalam materi pembelajaran di sekolah. Misal kunjungan industri, itu menjadi bagian yang kita dorong. Tapi bagaimanapun, jangan sampai memberatkan (siswa)," jelas Didik.

Ia menambahkan, bagi sekolah yang akan melakukan perjalanan dan menggunakan jasa travel/perusahaan bus harus melakukan cek kendaraan yang akan digunakan untuk memastikan keamanan kendaraan yang akan digunakan.

(Ria)

## JAGA EKOSISTEM DIGITAL

# Keamanan Siber Prioritas Utama

**YOGYA (KR)** - Serangan siber dapat merusak data pribadi, ekonomi, infrastruktur dan keamanan nasional. Menyadari hal itu, keamanan siber menjadi prioritas utama dan semakin penting untuk melindungi data pribadi, informasi sensitif dan menjaga ekosistem digital guna memaksimalkan manfaat ekonomi digital Indonesia.

"Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), trafik anomali di Indonesia selama 2023 mencapai 403.990.813. Adapun capaian tertinggi yaitu pada Agustus dengan jumlah 78.464.385. Anomali ini menurunkan kinerja jaringan, mencuri data sensitif, dan merusak reputasi organisasi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono dalam acara

Bimtek Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber pada CSIRT Organisasi Pemerintah Pusat Tahun 2024 di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Senin (14/5). Oleh karena itu, kompetensi keamanan informasi harus terus dikembangkan karena ancaman siber terus berkembang. Ia mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menangani insiden keamanan melalui 'Computer Security Incident Response Team' (CSIRT).

CSIRT itu memiliki tiga area layanan di antaranya yaitu Reaktif, Proaktif dan Manajemen Kualitas Keamanan. Hal itu berperan untuk mengendalikan cakupan dampak serangan dan memulihkan sistem teknologi agar layanan normal kembali.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Putu Jayan Danu Putra mengungkapkan, dalam menyikapi maraknya serangan siber yang terjadi diperlukan peran setiap instansi pemerintah untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam melindungi aset data dan informasi dari serangan siber. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kesiapan dalam menghadapi insiden data siber.

"BSSN merasa perlu dan penting untuk mendorong para stakeholder agar memiliki kapabilitas dan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dan sandi khususnya terkait penanganannya dan pengelolaan insiden siber," ungkapnya.

Putu mengingatkan, implementasi kegiatan pengelolaan insiden siber di sektor pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip *whole of government*, suatu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menitikberatkan pada sinergi dan kolaborasi berbagai pihak.

"Dalam konteks itu, penanganan insiden di sektor pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab BSSN, melainkan bersama-sama dengan seluruh Kementerian dan Lembaga," tandasnya. (Ria)

## 1.077 MAHASISWA UIN SUKA DIWISUDA

# Al Makin Ajak Pahami Kecerdasan Buatan

**YOGYA (KR)** - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta Prof Al Makin mengajak mahasiswa yang dinyatakan lulus dari perguruan tinggi ini untuk memahami tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang pada era sekarang ini sedang berkembang.

"Para wisudawan dan wisudawati untuk tidak berkecil hati menjadi sarjana Muslim dengan berkembangnya kecerdasan buatan atau AI ini," kata Rektor dalam sambutannya usai mewisuda 1.077 wisudawan di gedung Multi Purpose kampus setempat,

Selasa (14/5).

Oleh karena itu, Prof Makin mengajak untuk memahami tentang AI yang bisa diartikan kecerdasan buatan, kecerdasan buatan atau kecerdasan bukan sebenarnya yang sekarang ramai dibicarakan. Kecerdasan bukan manusia, tetapi manusia yang membuat kecerdasan itu.

"Siapa yang menggunakan kalkulator di handphone untuk menghitung utang dan keuangan, siapa menggunakan komputer, siapa yang *search* di Google dan lain-lain itu semua menunjukkan penggunaan AI. Sejauh mana kita sadar informasi dari



KR-Antara/Humas UIN Suka

**Wisudawan dan wisudawati UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

mesin, bukan dari mulut manusia," ujarnya.

Rektor mengatakan karena terlalu banyak melihat film fiksi, fiksi tentang sains, dikhawatirkan ada AI yang seperti mesin

yang bisa mempunyai kesadaran, yang bisa tidak taat manusia dan akhirnya memberontak manusia, yang menciptakan AI itu sendiri.

(Ant)

# EKONOMI

## LPS TERUS LAKUKAN TEROBOSAN Optimalkan Penanganan Bank Gagal

**SOLO (KR)** - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berinovasi untuk menjaga kepercayaan nasabah perbankan. Terbaru, LPS melakukan dua terobosan dalam penanganan bank gagal. Terobosan pertama percepatan proses pembayaran klaim bank yang dicabut izin usahanya.

"Dalam rangka memberikan rasa tenang kepada masyarakat khususnya nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang dilikuidasi, Tim LPS bergerak cepat dimana secara rata-rata pembayaran klaim sudah mulai dilakukan 5 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujar Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisiner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan Resolusi Bank dalam Acara Temu Media wilayah Yogya, Solo, Semarang di Solo, Minggu (12/5) malam.

Didik Madiyono meng-



KR-M Nur Hasan

**Didik Madiyono**

ungkapkan, berdasarkan data LPS, rata-rata waktu pembayaran klaim menunjukkan tren positif. Jika tahun-tahun sebelumnya antara 9-14 hari kerja, sekarang lebih cepat menjadi 5 hari kerja.

Selain percepatan pembayaran klaim simpanan nasabah, terobosan LPS selanjutnya early intervention dalam penanganan bank. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), LPS dapat lebih maju ke depan dalam menangani bank se-

belum kondisi bank tersebut menjadi lebih buruk. Melalui UU ini, fungsi LPS sebagai otoritas resolusi bank tidak hanya sekadar menjadi paybox dan loss minimizer, namun telah meningkat menjadi fungsi risk minimizer dimana kewenangan LPS juga telah dilengkapi fungsi surveillance dan early intervention.

"Sekarang kami memiliki berbagai opsi untuk menangani bank sebelum bank tersebut dicabut izin usahanya kemudian dilikuidasi. Opsi tersebut misalnya melakukan penjualan bank atau aset-asetnya kepada investor yang berminat. Hal ini telah kami praktikkan dalam penanganan beberapa BPR yang tengah ditangani LPS atau berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR), misalnya dengan melakukan investor gathering untuk menawarkan aset-aset bank," papar Didik.

(San)

## Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga

**JAKARTA (KR)** - Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga stabil dengan kinerja intermediasi yang kontributif.

Kondisi tersebut didukung likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat di tengah peningkatan ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik dan trajectory penurunan inflasi yang berada di bawah ekspektasi pasar sehingga menimbulkan tekanan di pasar keuangan.

"Di Amerika Serikat (AS), Gross Domestic Product (GDP) melambat sebesar 1,6 persen qtd (sebelumnya: 3,4 persen), yang merupakan penurunan terendah dalam dua tahun terakhir, disebabkan peningkatan impor yang signifikan," ujar Mahendra Siregar, di Jakarta, Senin (13/5).

Meskipun demikian, kinerja ekonomi AS masih menunjukkan tanda-tanda penguatan yang lebih tinggi dari ekspektasi. Hal ini mendorong kembalinya ekspektasi suku bunga high/er for longer sehingga pasar memprediksi probabilitas pemotongan Fed Funds Rate (FFR) semakin menurun.

Berbeda dengan The Fed, European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BOE) dihadapkan dilema antara pertumbuhan yang rendah dan inflasi yang masih tinggi di Kawasan Eropa, namun pasar mengekspektasikan BOE dan ECB akan memilih menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan. (Lmg)

# Hingga Maret Telah Berkurang 66 BPR/BPRS

**JAKARTA (KR)** - Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, sejak Desember 2021 hingga Maret 2024, terjadi pengurangan 66 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

Berdasarkan data statistik OJK dari Desember 2021 1.623 BPR dan BPRS, namun hingga Maret 2024 menjadi 1.566 bank. "Pengurangan bank ini sejalan dengan arah pengembangan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berdasarkan hasil dari analisis dan evaluasi, masih akan terus melakukan konsolidasi," jelas Dian Ediana Rae, Senin (13/5).

Dalam pengertian, ujarnya, penguatan terhadap BPR melalui proses merger atau penggabungan, akuisisi masih terus laku-

kan. Dikatakan, meski terjadi pengurangan bank, namun pertumbuhan aset, kredit dan DPK justru menunjukkan pertumbuhan positif dan konsisten ini naik terus antara 7-8 persen.

"Misalnya untuk kredit ada yang 9,42 persen, DPK 8,06 persen, aset tumbuh 7,34 persen," katanya.

Jadi sebetulnya, konsolidasi BPR/BPRS ini sudah terbukti sebetulnya memperkuat ketahanan permodalan bank dan tentu juga dengan penguatan penerapan tata kelola dan manajemen risiko, sehing-

ga membuat nilai tambah BPR/BPRS terhadap masyarakat dan perekonomian justru semakin meningkat.

"Ini *clue* yang sebetulnya, jadi kalau kita lihat konsolidasi yang kita lakukan juga melakukan penggabungan kemudian mengurangi kantor, itu tidak. Kantor itu tetap ada, tetapi kemudian menjadi kantor cabang," ucap Dian.

BPR/BPRS yang ditutup, katanya, sudah dilakukan mediasi dan memang secara mendasar tidak mungkin lagi bisa diselamatkan. Mungkin karena didalamnya ada produk atau memang kelemahan keuangan yang sangat signifikan, sehingga sudah tidak mungkin lagi ketemu dengan investor dan lain sebagainya.

"Ini sedang kita kerjakan, apalagi sejalan dengan UU P2SK kita tahu,

BPR/BPRS ini diberikan penguatan-penguatan. Kalau kita lihat sekarang bisa Inisial Public offering (IPO) kemudian juga melakukan sistem pembiayaan," jelasnya.

Diterangkan, nantinya akan terlihat BPR/BPRS ini dari waktu ke waktu semakin mendekati bank umum. "Akan dilihat performancenya, rasio-rasio keuangan akan semakin menguat dari waktu ke waktu," katanya, seraya menyebutkan, sekarang sedang terus melakukan itu.

Dian mengatakan, dalam 1-2 tahun ini mungkin tahap pembersihan dulu, dan nantinya akan menjadi kuat. Kenapa BPR/BPRS itu harus diperkuat karena BPR/BPRS merupakan garda terdepan perekonomian, khususnya terkait dengan pengembangan UMKM dan masyarakat. (Lmg)

## 198 PROYEK PSN SELESAI

# Dampak Output Perekonomian Capai Rp 3.344 T

**JAKARTA (KR)** - Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, Pemerintah fokus mengembangkan penyediaan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah melalui pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam berbagai sektor, seperti penunjang konektivitas, ketahanan energi, kedaulatan pangan dan hilirisasi industri.

Secara kumulatif sejak 2016, sebanyak 198 proyek telah selesai, 32 proyek dan 10 program sudah beroperasi sebagian. Selain itu, 44 proyek dan 3 program dalam tahap konstruksi, dengan estimasi memberikan dampak output perekonomian mencapai Rp 3.344 triliun secara nasional dan penyerapan tenaga kerja langsung 2,71 juta orang.

Selain sejumlah sektor tersebut, Pemerintah juga memahami peran vital komoditas *critical minerals* dalam mendukung transisi dan ke-

tahanan energi, antara lain sebagai bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, hingga industri baterai.

"Infrastruktur terus menjadi sebuah fokus dalam pembangunan nasional. Relevansi dan urgensi infrastruktur juga ada dalam RPJMN," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Nasional untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tema Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN, Selasa (14/5).

Untuk itu, secara khusus pada sektor pengolahan mineral, Pemerintah telah melakukan Program Pengembangan Smelter PSN. Di antaranya 9 smelter fasilitas pengolahan nikel dengan estimasi output mencapai 2,5 juta ton per tahun dan 4 smelter fasilitas pengolahan bauksit dengan estimasi output mencapai

3 juta ton per tahun.

Pada tahun 2024 ini, Pemerintah mengestimasi untuk dapat menyelesaikan 41 PSN senilai Rp 554 triliun. Untuk mencapai target tersebut, perlu dilakukan pembahasan terkait sejumlah isu strategis yang memerlukan dukungan penyelesaian dari berbagai stakeholder, diantaranya perizinan dan penyiapan, keketahanan, pengadaan lahan, pembiayaan dan konstruksi.

Capaian proyek akan dievaluasi pada setiap tahapan proyek, meliputi penyiapan, transaksi, konstruksi dan operasi.

Hasil evaluasi secara komprehensif akan dilaporkan kepada Presiden untuk dilakukan penyesuaian daftar PSN, yang selanjutnya dapat menjadi masukan untuk agenda pembangunan dalam Pemerintahan ke depan.

(Lmg)